

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Evaluasi Program**

##### **2.1.1. Evaluasi**

Evaluasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran. Tyler yang dikenal sebagai bapak evaluasi menyatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses yang menilai sejauh mana tujuan dari suatu program telah tercapai (Ambiyar & Muharika, D. 2019). Anderson menyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses yang menentukan hasil yang telah dicapai dalam berbagai kegiatan yang direncanakan untuk mendukung pencapaian tujuan (Ambiyar & Muharika, D. 2019). Worthen dan Sanders menyatakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan untuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai eksistensi suatu program serta alternatif strategi yang diusulkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ambiyar & Muharika, D. 2019).

Stufflebeam dan Shinkfield menyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu kegiatan investigasi, melakukan penelitian, melakukan penyelidikan, atau pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis terhadap nilai suatu objek (Ananda, R. & Rafida, T. 2017). Arikunto dan Jabar menyatakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan suatu hal, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam pengambilan keputusan (Abdul, J. & Arikunto, S. 2018). Wirawan menyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan serta menyajikan informasi terkait objek yang dievaluasi, kemudian dinilai dengan menggunakan standar evaluasi, serta hasil penilaian tersebut dimanfaatkan untuk membuat keputusan mengenai objek evaluasi (Ambiyar & Muharika, D. 2019).

Menurut Djaali dan Muljono, evaluasi merupakan suatu proses penilaian terhadap sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditentukan, yang kemudian diikuti dengan pengambilan keputusan mengenai objek yang dievaluasi (Ananda, R. & Rafida, T. 2017). Sudjana mengartikan evaluasi sebagai suatu kegiatan yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data sebagai input dalam proses pengambilan keputusan terkait program yang sedang dan/atau telah dilaksanakan (Ananda, R. & Rafida, T. 2017). Secara keseluruhan, evaluasi merupakan proses yang melibatkan pengumpulan dan analisis informasi untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

### **2.1.2. Program**

Arikunto dan Jabar menyatakan bahwa apabila program secara langsung berhubungan dengan evaluasi program, maka program tersebut didefinisikan sebagai sebuah unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan manifestasi atau pelaksanaan dari suatu kebijakan, berlangsung dalam sebuah proses yang berkelanjutan, dan berlangsung dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok individu (Abdul, J. & Arikunto, S. 2018). Menurut Feuerstein, suatu program merupakan rencana yang tujuan, metode dan konteksnya telah ditentukan sebelumnya (Ananda, R. & Rafida, T. 2017). Suherman dan Sukjaya menjelaskan bahwa program merupakan rencana kegiatan yang perumusannya bersifat operasional dengan memperhitungkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencapaian program tersebut (Ananda, R. & Rafida, T. 2017).

Ambiyar dan Muharika Dewi menyatakan bahwa program adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan sub-sub sistem yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan kegiatan dalam sebuah organisasi (Ambiyar & Muharika, D. 2019). Menurut Fikir, dkk program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi kebijakan dan

rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu (Fikri dkk., 2019). Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa program merupakan suatu rencana atau kesatuan kegiatan yang melibatkan berbagai elemaen dalam organisasi dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu

### **2.1.3. Evaluasi Program**

Ralph Tyler menyatakan bahwa evaluasi program merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui sejauh mana tujuan program dapat direalisasikan (Abdul, J. & Arikunto, S. 2018). Stufflebeam menyatakan bahwa evaluasi program merupakan suatu kegiatan yang bertujuan menyediakan informasi berbagai hal yang akan disampaikan kepada pengambil keputusan (Abdul, J. & Arikunto, S. 2018). Menurut Arikunto dan Jabar, evaluasi program merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari kegiatan yang telah direncanakan (Abdul, J. & Arikunto, S. 2018). Mes menyatakan bahwa evaluasi program merupakan suatu prosedur penelitian yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menggunakan informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai suatu program (Ambiyar & Muharika, D. 2019).

Menurut Ambiyar dan Muharika, evaluasi program merupakan suatu kegiatan atau usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu program yang dilaksanakan, dengan tujuan untuk menilai sejauh mana kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kemudian untuk mengetahui keputusan apa yang dapat diambil terkait dengan penilaian yang telah dilakukan (Ambiyar & Muharika, D. 2019). Briekerhoff dkk. mendefinisikan evaluasi program sebagai suatu proses untuk menentukan sejauh mana tujuan dan sasaran dari program atau proyek telah tercapai, memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan, membandingkan kinerja dengan standar untuk mengetahui adanya kesenjangan, penilaian harga dan

kualitas melalui penyelidikan yang dilakukan secara sistematis tentang nilai atau kualitas suatu objek (Ananda, R. & Rafida, T. 2017). Menurut Fikri, dkk, evaluasi program merupakan suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam sebuah proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok individu untuk pengambilan keputusan (Fikri dkk., 2019). Berdasarkan definisi evaluasi program dari berbagai ahli, dapat disimpulkan bahwa evaluasi program adalah proses yang sistematis untuk menilai sejauh mana tujuan atau sasaran suatu program telah tercapai, serta untuk menyediakan berbagai informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Evaluasi program melibatkan pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi untuk menentukan efektivitas dan keberhasilan program yang telah dilaksanakan.

#### **2.1.4. Tujuan Evaluasi Program**

Weiss mengemukakan tujuan dari evaluasi program adalah: (1) Menunjuk pada metode penelitian yang digunakan, (2) Menekankan hasil dari suatu program, (3) Menggunakan kriteria untuk melakukan penilaian, serta (4) Memberikan kontribusi terhadap pengambilan keputusan serta perbaikan program di masa yang akan datang. (Ananda R. & Rafida, T. 2017). Sukmadinata menjelaskan tujuan evaluasi program adalah: (1) Membantu perencanaan dalam pelaksanaan program, (2) Membantu dalam menentukan penyempurnaan keputusan atau perubahan program, (3) Membantu dalam menentukan keputusan mengenai keberlanjutan atau penghentian program, (4) Menemukan fakta-fakta yang mendukung serta yang menolak terhadap program, serta (5) Memberikan kontribusi dalam pemahaman proses psikologis, sosial, dan politik dalam pelaksanaan program serta faktor-faktor yang mempengaruhi program (Ananda R. & Rafida, T. 2017).

Mutrofin mengemukakan bahwa tujuan dari evaluasi program adalah untuk memperoleh informasi-informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan dalam proses pemilihan di antara berbagai kebijakan atau program alternatif untuk mencapai tujuan program (Ananda R. & Rafida, T. 2017). Ambiyar dan Muharika menyatakan bahwa pada dasarnya, tujuan dari melakukan evaluasi program adalah untuk mengetahui sejauh mana suatu program yang telah dirancang dan direncanakan berkontribusi dalam mencapai tujuan program (Ambiyar & Muharika, D. 2019). Dari pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan evaluasi program adalah untuk menilai sejauh mana efektivitas program, serta untuk mengumpulkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan, menyempurnakan program, memastikan keberlangsungan program ataupun penghentian program.

## **2.2. Pendidikan Karakter**

### **2.2.1. Pengertian Pendidikan Karakter**

Pendidikan karakter sangat penting dalam membentuk individu yang berkarakter baik. Karena tanpa karakter yang baik, seorang individu tidak akan mampu menghadapi tantangan dan perubahan di masa depan. Pendidikan karakter juga membantu individu untuk berinteraksi secara positif dengan orang lain dalam masyarakat, sehingga dapat menciptakan harmoni dan persatuan. Terdapat beberapa pengertian pendidikan karakter, diantaranya menurut John W. Santrock, pendidikan karakter merupakan pendidikan yang diberikan secara langsung kepada para peserta didik dan bertujuan untuk menumbuhkan nilai-nilai moral serta memberikan bimbingan kepada siswa mengenai pengetahuan moral sebagai usaha untuk mencegah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral tersebut. (Fadilah, dkk., 2019).

Ibrahim, dkk., menjelaskan bahwa pendidikan karakter adalah usaha menstranformasikan nilai-nilai kehidupan untuk ditanamkan dalam jati diri setiap

manusia agar menunjukkan perilaku yang baik (Ahyar, 2022). Rosidatun menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah hal-hal positif yang dilakukan oleh pendidik dalam memberikan pengaruh terhadap karakter peserta didik yang mereka ajar. Aspek-aspek positif yang dimaksud mencakup kejujuran, kepedulian, kerajinan, keuletan, disiplin, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap sesama. (Muliyah, P. dkk, 2020). Sabar Budi Raharjo berpendapat bahwa pendidikan karakter merupakan pendidikan yang harus dilakukan secara menyeluruh dan merupakan perpaduan antara dimensi moral dengan ranah sosial dalam kehidupan peserta didik sebagai dasar terbentuknya generasi yang mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan (Wahyuni, 2021). Pendidikan karakter merupakan sebuah sistem yang menginternalisasi nilai-nilai karakter melalui komponen pengetahuan, kesadaran, dan tindakan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut (Indriani, dkk., 2023).

Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah Pendidikan karakter adalah usaha yang dilakukan secara sistematis dan menyeluruh untuk menanamkan dan menginternalisasi nilai-nilai moral, sosial, dan etika kepada peserta didik. Tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membentuk perilaku yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang diterima dalam masyarakat, seperti kejujuran, kepedulian, kerajinan, disiplin, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap sesama. Pendidikan karakter melibatkan proses transformasi nilai-nilai kehidupan ke dalam jati diri peserta didik agar mereka dapat hidup mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki prinsip kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kehidupan sosial mereka.

### **2.2.2. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter**

Pendidikan karakter telah menjadi komponen yang penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, pendidikan karakter

bukan hanya sekadar pembelajaran tentang nilai-nilai moral, tetapi juga menjadi bagian integral dari pembentukan jati diri peserta didik yang mampu hidup mandiri dan berakhlak mulia. Kurikulum Merdeka mendorong penguatan identitas sebagai warga negara Indonesia yang memiliki karakter dan nilai-nilai budaya yang kuat. Karakter yang dikembangkan adalah karakter yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila atau yang dikenal sebagai wujud Profil Pelajar Pancasila. (Kusumawati, 2022).

Profil Pelajar Pancasila berperan sebagai penunjuk arah kebijakan pendidikan di Indonesia. Selain itu, Profil Pelajar Pancasila juga menjadi rujukan untuk perancangan standar kompetensi kelulusan dan pengembangan standar-standar lainnya. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga satuan pendidikan menjadi selaras menuju tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Profil Pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi karakter yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, bergotong royong, berkebhinnekaan global, bernalar kritis, kreatif dan mandiri (Inayah; Ulandari & Rapita, 2023). Kegunaan Profil Pelajar Pancasila yang dijelaskan dalam aplikasi PMM adalah (1) menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti oleh semua pemangku kepentingan pendidikan. (2) menjadi panduan pengembangan karakter bagi pendidik dan pelajar Indonesia (3) Tujuan akhir seluruh pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan. (Susilawati, dkk., 2021).

Profil pelajar Pancasila merupakan suatu rumusan yang mendukung tercapainya cita-cita dan tujuan utama pendidikan, serta menjadi komitmen penyelenggara pendidikan dalam membangun sumber daya manusia Indonesia . Untuk mencapai lulusan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, diperlukan pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila (Susilawati, dkk., 2021). Pembelajarannya

dapat diimplementasikan dalam berbagai ranah, termasuk intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, maupun budaya sekolah (Komala & Nurjannah, 2023). Sebagai bagian dari budaya sekolah, 6 dimensi Profil Pelajar Pancasila diintegrasikan ke dalam iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi serta norma yang berlaku di sekolah (A A Musyaffa, dkk., 2024).

### **2.2.3. Strategi Pelaksanaan Pendidikan Karakter**

Pendidikan karakter merupakan inti dari penguatan pendidikan nasional dalam rangka membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan sosial. Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan berorientasi pada pembentukan Profil Pelajar Pancasila. Oleh karena itu, strategi pelaksanaan pendidikan karakter harus dilakukan secara menyeluruh, tidak terbatas pada satu pendekatan saja, melainkan melalui berbagai jalur berikut:

#### **1. Integrasi dalam Mata Pelajaran**

Integrasi nilai-nilai karakter ke dalam pembelajaran merupakan pendekatan yang efektif untuk menjadikan pendidikan karakter sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan akademik. Dalam Kurikulum Merdeka, guru diberi keleluasaan untuk mengaitkan kompetensi dasar dengan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, gotong royong, dan kemandirian dalam konteks materi pelajaran. Integrasi dalam mata pelajaran dapat dilakukan melalui pemilihan konteks pembelajaran yang relevan, studi kasus, atau refleksi terhadap peristiwa tertentu dalam mata pelajaran.

#### **2. Pembiasaan dalam Kehidupan Sekolah**

Strategi pembiasaan dilakukan dengan menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung perilaku positif. Pembiasaan ini meliputi kegiatan rutin seperti salam, menyanyikan lagu kebangsaan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, serta menjaga

kebersihan dan kedisiplinan. Lingkungan sekolah harus dirancang sebagai "ekosistem karakter", di mana setiap interaksi sosial mengandung muatan nilai. Pembiasaan yang konsisten akan membentuk kebiasaan moral yang menjadi bagian dari kepribadian siswa.

### 3. Kegiatan Ekstrakurikuler dan Kokurikuler

Kegiatan di luar pembelajaran formal seperti ekstrakurikuler dan kokurikuler memberikan ruang pengembangan karakter melalui pengalaman langsung. Kegiatan seperti pramuka, olahraga, seni, dan pengabdian masyarakat memungkinkan siswa mengembangkan kepemimpinan, kerja sama, disiplin, dan tanggung jawab. Kurikulum Merdeka mendorong kegiatan proyek yang kolaboratif dan berbasis minat, sebagai bagian dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

### 4. Keteladanan Guru dan Tenaga Kependidikan

Keteladanan adalah unsur penting dalam pendidikan karakter karena siswa lebih mudah meniru daripada mendengarkan. Guru dan tenaga kependidikan sebagai figur otoritas memiliki peran sentral dalam menjadi contoh nyata perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur. Dalam konteks sekolah, guru yang menunjukkan integritas, tanggung jawab, dan empati, secara tidak langsung menanamkan nilai yang sama kepada peserta didik.

## **2.3. Pendidikan Ketrunaan**

Pendidikan ketrunaan merupakan suatu sistem pendidikan yang dapat ditemukan di beberapa perguruan tinggi, sekolah menengah atas dan sekolah kejuruan (Shofyan, 2023). Ketrunaan memiliki pengertian sebagai suatu sistem pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip militer dengan tujuan untuk membentuk karakter. Tentunya, prinsip militer yang diterapkan bukanlah militer murni, karena sebagian besar lulusan perguruan tinggi, SMA, dan SMK ditujukan untuk menjadi pegawai di

lingkungan sipil, perusahaan, militer, dan dunia wirausaha (Kuncoro, dkk., 2020).

Karakter yang terbentuk diantaranya: disiplin, tanggung jawab, jujur, nasionalisme, mandiri, beriman, sopan santun, dan gotong royong (Annisah & 'Afifah, 2022). Kedisiplinan merupakan karakter utama yang sangat menonjol pada sekolah yang menerapkan sistem ketrunaan (Novitasari, A. & 'Afifah, 2022) Selain itu, sistem ketrunaan telah mampu melakukan pencegahan pada kenakalan remaja (Annisah & 'Afifah, 2022).

Dapat disimpulkan bahwa ketrunaan adalah sistem pendidikan yang mengadopsi prinsip-prinsip militer, akan tetapi prinsip yang diterapkan bukanlah prinsip murni militer melainkan dengan pelatihan dasar karakter dan kebangsaan, yang bertujuan menanamkan karakter atau kepribadian yang baik pada peserta didik, seperti sikap disiplin, kejujuran, kemandirian, sopan santun, gotong royong, dan tanggung jawab.

Pada jenjang SMA ataupun SMK, program ketrunaan diimplementasikan dalam penerapan budaya sekolah, diantara yang menerapkannya antara lain SMK Negeri 13 Malang, SMK Negeri 2 Jiwana (Supriyadi, 2020), SMK Negeri 2 Subang dan SMK Negeri 1 Cipeundeuy (Ramdani, dkk., 2022). Budaya sekolah berbasis ketrunaan merupakan salah satu pendekatan dalam melaksanakan pendidikan karakter di sekolah melalui aktivitas sehari-hari yang berlangsung di sekolah. Dengan adanya budaya, sekolah dapat melakukan adaptasi dalam berbagai kondisi masyarakat serta mampu membentuk karakter warga sekolah terutama karakter peserta didik (Ramdani, dkk., 2022)

#### **2.4. Perundungan Dalam Pendidikan**

Perundungan (bullying) dalam dunia pendidikan merupakan fenomena serius yang dapat menghambat perkembangan sosial, emosional, bahkan akademik peserta didik. Perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang oleh seseorang

atau sekelompok orang terhadap individu lain yang dianggap lebih lemah, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Perilaku ini mencakup kekerasan verbal, fisik, sosial, maupun dalam bentuk perundungan siber (*cyberbullying*), yang kesemuanya berdampak negatif pada korban, pelaku, maupun lingkungan sekolah secara umum.

Dalam konteks pendidikan, sekolah semestinya menjadi ruang yang aman dan mendukung tumbuh kembang peserta didik. Namun pada kenyataannya, banyak kasus perundungan terjadi di lingkungan sekolah, baik dilakukan oleh sesama siswa maupun oleh guru terhadap siswa (atau sebaliknya). Berdasarkan data yang diperoleh dari survei awal situasi perundungan siswa jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kerjasama UNICEF dan Kemendikbudristek untuk Program Roots menggunakan U-Report pada tahun 2021, yang diikuti oleh 478 sekolah dari 33 provinsi dengan 85.071 responden pada periode 12 sampai dengan 21 Agustus 2021, dari pertanyaan “apakah perundungan terjadi di sekolah?” 14% menjawab “iya”, 39% menjawab “tidak” dan 47% menjawab “tidak tahu”. Sedangkan data Frekuensi siswa SMK yang mengalami perundungan dalam 30 hari terakhir, 25% menjawab hampir setiap hari, 25 % menjawab setiap minggu, dan 50% menjawab beberapa kali dalam sebulan. Adapun bentuk perundungan yang dialami siswa SMK dalam 30 hari terakhir antara lain 31% relasional, 24% verbal, 24% lainnya, 14% *cyberbullying*, 4% fisik, dan 3% seksual.

Selain itu, berdasarkan data SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) di tahun 2022, tercatat ada 25.685 kasus pelaporan kekerasan terhadap anak, dengan korban laki-laki sebanyak 4.264 dan korban perempuan sebanyak 23.315, dari data tersebut sejumlah 1.039 kasus terjadi di sekolah (SIMFONI-PPA, 2022). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sejumlah kasus kekerasan pada anak di sejumlah daerah saat Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 2022 digelar, tercatat sebanyak 12.920 kasus yang terdiri dari 1.991 laki-laki dan 11.949

perempuan (Popi Siti Ichsanniaty, 2022). Kasus yang tercatat ini adalah kasus kekerasan disekolah yang dilaporkan, dan merupakan sebagian kecil dari kasus kekerasan yang sebenarnya terjadi di sekolah. Perundungan yang dibiarkan tanpa intervensi sistematis akan menciptakan iklim sekolah yang tidak kondusif dan berpotensi menciptakan lingkaran kekerasan yang berulang.

Perundungan dalam pendidikan juga sering kali tidak hanya terjadi sebagai tindakan individu, tetapi terlembaga dalam bentuk budaya sekolah yang permisif terhadap kekerasan. Fenomena ini dapat terlihat pada praktik-praktik yang dibalut dalam "tradisi", seperti *ospek*, peloncoan, atau budaya senioritas dalam sekolah berasma dan sekolah semi-militeristik (ketarunaan). Dalam beberapa kasus, sistem hierarki yang ketat justru memperkuat relasi kuasa yang timpang, dan memberikan ruang bagi praktik perundungan yang dilegitimasi atas nama pembentukan karakter atau kedisiplinan.

Perundungan bukan hanya masalah hubungan antarindividu, tetapi merupakan kegagalan institusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan adil. Oleh karena itu, tanggung jawab utama pencegahan perundungan berada pada sistem sekolah: melalui kebijakan yang jelas, penegakan aturan yang konsisten, serta pembentukan budaya sekolah yang menolak segala bentuk kekerasan. Upaya pendidikan karakter yang tidak diiringi dengan pengawasan terhadap praktik kekerasan tersembunyi justru dapat menciptakan kontradiksi antara nilai yang diajarkan dengan kenyataan yang dialami peserta didik.

## **2.5. Model Evaluasi CIPP**

Hutahean menyatakan bahwa model evaluasi CIPP dikembangkan oleh Komite Studi Evaluasi yang dibentuk oleh Komite Penasehat Riset (Research Advisory Committee) Phi Delta Kappa, yang dipimpin oleh Stufflebeam. Pada saat ia memimpin

tim ini, ia bekerja di Ohio State University. Organisasi ini memberikan tugas kepada Stufflebeam dan rekan-rekannya untuk mengembangkan pemikiran mengenai evaluasi pendidikan. CIPP adalah singkatan dari empat istilah yang menjadi fokus evaluasi program, yaitu *Context*, *Input*, *Process*, dan *Product*. (Hutahaean, W. dkk., 2021).

Model CIPP dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam pada tahun 1967. Model evaluasi ini memandang sebuah program sebagai suatu kesatuan sistem yang harus dievaluasi secara menyeluruh, dimulai dari mengidentifikasi konteks program, input yang digunakan, proses pelaksanaan program, serta produk akhir dari program tersebut. Tujuan yang paling penting dari model evaluasi ini adalah bukan untuk membuktikan, melainkan untuk memperbaiki. Konsep evaluasi model CIPP ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, manajemen, perusahaan, dan organisasi lainnya. Selain itu, konsep ini dapat pula diterapkan pada suatu program, proyek, maupun kegiatan lainnya (Wirawan, S. M. Rahayu & Ghani, 2022).

Dalam bidang pendidikan, Sudjana dan Ibrahim (Ananda & Rafida, 2017) menerjemahkan masing-masing dimensi CIPP tersebut dengan makna:

- a. *Context*, yaitu situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi pendidikan yang akan dikembangkan dalam sistem yang bersangkutan, situasi merupakan faktor eksternal, seperti misalnya masalah pendidikan yang dirasakan, keadaan ekonomi negara, dan pandangan hidup masyarakat.
- b. *Input*, yang berkaitan dengan sarana, modal, bahan, dan rencana strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan pendidikan, komponen input mencakup pendidik, peserta didik, kurikulum, dan sarana prasarana.
- c. *Process*, merupakan pelaksanaan strategi dan penggunaan bahan, sarana, dan modal pada kegiatan nyata dilapangan, komponen proses meliputi kegiatan pembelajaran, pelatihan dan bimbingan.

- d. *Product*, merupakan hasil yang diperoleh baik sepanjang pelaksanaan maupun pada akhir pengembangan sistem pendidikan yang relevan, komponen produk mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Selanjutnya, masing-masing komponen dalam evaluasi model *Context Input Process Product* (CIPP) ini akan dikaji lebih dalam melalui pembahasan berikut:

### **2.5.1. Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*)**

Menurut Arikunto dan Jabar, evaluasi konteks adalah upaya menggambarkan dan merinci lingkungan, populasi atau sampel yang dilayani, kebutuhan yang belum terpenuhi, serta tujuan proyek (Abdul, J. & Arikunto, S. 2018). Tujuan dari evaluasi konteks, menurut Winaryati, adalah untuk menilai keseluruhan objek, mengidentifikasi kelemahan serta kelebihan, yang selanjutnya akan digunakan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan (Winaryati dkk., 2021). Arikunto and Jabar (Abdul, J. & Arikunto, S. 2018) memberikan contoh pertanyaan yang dapat diajukan sehubungan dengan evaluasi konteks, diantaranya : (1) Kebutuhan apa saja yang tidak atau belum terpenuhi oleh program? (2) Tujuan apa saja yang belum dapat tercapai oleh program? (3) Tujuan-tujuan manasajakah yang paling mudah dicapai?

Terkait tujuan program, menurut Puji Suci (2015) tujuan adalah penentu arah dan fokus bagi program yang dijalankan. Tujuan program yang jelas dan terukur menjadi landasan untuk mengevaluasi keberhasilan dan dampak program. Dengan mengevaluasi latar belakang dan tujuan program, kita bisa memastikan bahwa seluruh elemen program dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang ada, serta memberikan solusi yang sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi.

Menurut Emil J. Posavac (2015) evaluasi konteks digunakan untuk menilai sejauh mana visi dan misi program dapat tercapai dalam kondisi yang ada. Evaluasi konteks bukan hanya melihat apakah visi dan misi relevan, tetapi juga apakah strategi yang

diterapkan cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan kondisi dan tantangan yang muncul. Menurut Puji Suci (2015) visi adalah gambaran atau pandangan jauh ke depan tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam jangka panjang. Sedangkan misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam usahanya mewujudkan visi.

Menurut Emil J. Posavac (2015) evaluasi konteks digunakan untuk menilai kebutuhan peserta didik, memastikan bahwa program yang dijalankan dapat memenuhi harapan mereka. Dalam hal ini, evaluasi konteks berfungsi untuk menggali apakah program tersebut mampu memenuhi kebutuhan peserta didik secara menyeluruh, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, maupun kebutuhan lainnya yang relevan.

Dalam evaluasi konteks, memahami kebutuhan peserta didik dapat membantu untuk menilai apakah visi dan misi program relevan dengan kondisi nyata yang ada. Jika visi dan misi program tidak mencerminkan kebutuhan peserta didik, maka program tersebut mungkin tidak akan efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, evaluasi konteks yang memadai dapat membantu menyesuaikan visi dan misi program agar lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan lebih baik.

### **2.5.2. Evaluasi Input (*Input Evaluation*)**

Menurut Farida, evaluasi input adalah evaluasi yang bertujuan untuk membantu menentukan keputusan, mengidentifikasi sumber-sumber yang tersedia, alternatif yang diambil, rencana dan strategi untuk memenuhi kebutuhan, serta prosedur kerja untuk mencapainya. (Ambiyar & Muharika, D. 2019). Winaryati menyatakan bahwa evaluasi input dimanfaatkan untuk membantu dalam pengambilan keputusan, mengidentifikasi sumber daya yang tersedia, merencanakan dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan, serta menetapkan prosedur kerja untuk mencapainya. (Winaryati dkk.,

2021). Djuju (Ambiyar & Muharika, D. 2019) menyatakan bahwa model ini menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: (1) Apakah rencana yang disusun pernah diimplementasikan pada waktu yang lalu? (2) Apakah asumsi-asumsi yang digunakan akan dapat dicapai? (3) Apa aspek-aspek sampingan yang dihasilkan program? (4) Bagaimana masyarakat mereaksi program? (5) Dapatkah program dilakukan dengan berhasil?

Sudjana dan Ibrahim mengemukakan bahwa dalam konteks pendidikan, komponen input meliputi siswa, guru, desain, sarana dan fasilitas (Ananda & Rafida, 2017). Sedangkan Agus Salim,dkk (2024) mengemukakan bahwa komponen input seperti program, pengajar, sarana dan prasarana serta pendanaan mempengaruhi program pendidikan karakter.

Berdasarkan hal tersebut, maka Sumber daya manusia (SDM) memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan suatu program. SDM yang berkualitas, baik itu tenaga pendidik, peserta didik, maupun tenaga pendukung lainnya, menjadi kunci utama dalam menentukan efektifitas dan keberhasilan program pendidikan. Selain itu program kegiatan juga memiliki dampak yang luas terhadap keberhasilan suatu program pendidikan. Program yang dirancang dengan baik, melibatkan seluruh pihak terkait, serta evaluasi dan perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan akan berdampak pada keberhasilan sebuah program. Tidak hanya SDM dan program kegiatan, komponen sarana prasarana dan pendanaan juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan sebuah program. Keduanya berperan sebagai faktor pendukung yang sangat penting untuk memastikan program dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien.

### **2.5.3. Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)**

Pada model evaluasi CIPP, evaluasi proses diarahkan untuk mencari informasi sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana. Rusydi Ananda & Tien Rafida mengemukakan bahwa evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, memberikan informasi untuk pembuatan keputusan program dan berfungsi sebagai catatan atau arsip prosedur yang terjadi (Ananda, R.& Rafida, T. 2017). Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan pada evaluasi proses menurut Stufflebeam (Ananda, R. & Rafida, T. 2017) sebagai berikut: (1) Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan? (2) Apakah staf yang terlibat selama pelaksanaan program akan sanggup menangani kegiatan selama pelaksanaan program berlangsung dan kemungkinan jika program tersebut dilanjutkan? (3) Apakah sarana prasarana yang disediakan dimanfaatkan secara maksimal? (4) Hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan selama pelaksanaan program dan kemungkinan jika program tersebut dilanjutkan?

Ambiyar dan Muharika menjelaskan bahwa evaluasi proses digunakan untuk membantu mengimplementasi keputusan, sampai sejauhmana rencana telah diterapkan dan apa saja yang harus diperbaiki. Komponen-komponen proses meliputi proses pelaksanaan program, proses pengelolaan program, dan hambatan manakah yang dijumpai selama pelaksanaan program berlangsung dan perlu diatasi. (Ambiyar & Muharika, D. 2019)

### **2.5.4. Evaluasi Produk (*Product Evaluation*)**

Rusydi Ananda dan Tien Rafida menyatakan bahwa evaluasi produk adalah suatu penilaian yang dilaksanakan untuk menilai ketercapaian atau keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Ananda, R. &

Rafida, T. 2017). Ambiyar dan Muharika menyatakan bahwa evaluasi produk mengukur dan menginterpretasikan pencapaian program selama pelaksanaan program serta pada akhir program (Ambiyar & Muharika, D. 2019). Winaryati dkk (2021) menjelaskan bahwa evaluasi produk digunakan untuk membantu membuat keputusan selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang dilakukan setelah program itu berjalan, dengan kata lain evaluasi ini merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Pada tahap evaluasi ini contoh pertanyaan yang dapat dimunculkan menurut Arikunto and Jabar (2018), antara lain: (1) Apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai? (2) Dalam hal-hal apakah berbagai kebutuhan peserta didik sudah dapat dipenuhi selama proses pelaksanaan program tersebut? (3) Apakah dampak yang diperoleh peserta didik dalam waktu yang relatif panjang dengan adanya program tersebut?

## **2.6. Penelitian-Penelitian yang Relevan**

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan pentingnya penerapan sistem pendidikan berbasis ketrunaan dalam membentuk karakter siswa. Shofyan (2023) menemukan bahwa ketrunaan dapat diterapkan diberbagai tingkat pendidikan, seperti perguruan tinggi, SMA, dan SMK, untuk mengembangkan karakter disiplin dan tanggung jawab. Penelitian Kuncoro dkk. (2020) juga mengungkapkan bahwa prinsip militer yang diterapkan dalam sistem ketrunaan bukan hanya bertujuan untuk mempersiapkan siswa di dunia militer, tetapi juga untuk membentuk individu yang siap berkontribusi dalam berbagai sektor, seperti dunia kerja sipil dan wirausaha. Sementara itu, Annisah & 'Afifah (2022) menunjukkan bahwa ketrunaan dapat mencegah kenakalan remaja dan menanamkan nilai-nilai seperti nasionalisme serta gotong royong. Selain itu, Novitasari & Saputri (2020) mengidentifikasi kedisiplinan sebagai karakter utama yang paling menonjol pada sekolah yang menerapkan sistem ketrunaan.